



Kerangka Acuan Buku Bunga Rampai “Catatan Jurnalis Sumut”

A. Pendahuluan

Kehidupan pers di Sumatera Utara tergolong dinamis dari segi jumlah media massa, baik cetak, elektronik, maupun siber. Dalam hal dinamika peristiwa, berita-berita yang tersebar pun sangat beragam dan tidak sedikit, mengingat kebhinekaan penduduk di provinsi ini. Namun demikian, pemikiran-pemikiran jurnalisnya tidak terekam secara sistematis yang dapat dijadikan referensi bagi banyak pihak dalam rentang waktu yang panjang.

Misalnya, publik barangkali ingin mengetahui dan memahami bagaimana jurnalis Medan memandang dan mengkaji peristiwa kekerasan oknum TNI AU beberapa waktu silam dalam kerangka pikir personal wartawan, tanpa “terbelenggu” oleh kepentingan-kepentingan perusahaan media, tempat ia bekerja. Pemikiran jurnalis yang disajikan dalam bentuk tulisan opini ataupun esai bermutu, dengan mengacu dari beragam referensi, akan sangat menarik dibaca, setidaknya karakter preferensi dan independensi jurnalis dapat tergambarkan dalam wujud tulisan. Selain itu penerbitan buku adalah sebuah tradisi tersendiri di AJI secara nasional (silahkan merujuk di laman khusus buku di web aji.or.id).

Kita tahu, beberapa tulisan jurnalis terkait dunia pers hanya berakhir di media sosial, ataupun mereka kiriman ke *blog* atau media massa lainnya. Alangkah luar biasanya kalau beragam tulisan itu disatukan menjadi satu buku, agar secara “menyeluruh” menggambarkan pemikiran personal jurnalis tentang kedalaman pengalaman, kepekaan, pengamalan, dan pengetahuan serta kompetensi yang dimilikinya.



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

The Alliance of Independent Journalist

www.medan.aji.or.id

B. Spesifikasi Penerbitan

Penanggung Jawab	: Vinsensius Sitepu (Koordinator Divisi Komunikasi & Data AJI Medan)
Terbit	: Senin, 7 Agustus 2017
Rancangan judul	: Catatan Jurnalis Sumut
Penerbit	: AJI Medan bekerjasama dengan Penerbit Puspantara.org atau dengan USU Press atau dengan Percetakan Gramedia
Dimensi buku	: 13,5 cm x 21 cm
Jumlah halaman	: 300 halaman
Oplah	: 500-1.000 eksemplar
Format	: cetak dan digital (Google Play Book)
Penulis	: anggota AJI Medan dan wartawan se Sumatera Utara (30-35 orang)
Penyunting	: Liston Damanik & Vinsensius Sitepu
Kata Pengantar	: Ketua AJI Pusat dan Ketua AJI Medan
Tata letak	: Muhammad Zahrawi
Sasaran pembaca	: mahasiswa, guru, dosen, wartawan

C. Kriteria Naskah

:: *Pilihan topik*: kebebasan pers, politik media massa, jurnalisme siber, teknologi media, media baru, *journalism-social media-related*, *data-driven journalism*, kesejahteraan jurnalis, serikat buruh media, perempuan dan media, *mediapreneurship*, dan lain-lain yang terkait dengan media dan jurnalisme.

:: *Panjang naskah*: 1.000 kata. (*ukuran kertas A4, margin keliling 2 cm, Times New Roman, 12 point, dan spasi antarbaris 1,5 point*).

:: *Format file*: DOCX.



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

The Alliance of Independent Journalist

www.medan.aji.or.id

:: Sertakan foto (file terpisah; tidak di dalam naskah tulisan) dan profil singkat penulis (*lihat pada lampiran II*).

:: Naskah yang telah dimuat di bentuk medium komunikasi lainnya memungkinkan dikirimkan kepada panitia.

:: Menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sesuai *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

:: Naskah berupa opini ataupun hasil riset (dengan bahasa ilmiah populer)

:: Naskah tidak mengandung SARA

:: Penyunting buku berhak mengganti judul dan isi naskah, sepanjang tidak mengubah makna dan maksud tulisan.

D. Tenggat Waktu

Naskah diterima oleh panitia, paling lambat pada **3 Juni 2017** melalui e-mail: be_web2001@yahoo.com (**Vinsensius Sitepu/081360933347**).

Lampiran I Tentang Penerbit Puspantara

Puspantara adalah sebuah lembaga penerbitan dan pusat studi Pancasila dan Kenusantaraan yang berdomisili di Medan yang fokus pada pengembangan dan penguatan pendidikan mutu sumber daya manusia melalui beragam bidang publikasi. Khususnya buku dan jurnal, kami memiliki kelebihan tersendiri, yang mampu membantu menaiktarafkan mutu, baik secara substantif, ejaan, wujud media, serta proses distribusi kepada khalayak.

Pengelola

- Hayyan Ulhaq, Guru Besar Hukum Utrecht Belanda (*Advisor*)
- Dr. Mirza Nasution, Dosen FH USU (*Chairman*)
- Fauzan Nurahmadi (CEO)
- Vinsensius Sitepu (CTO)

Publikasi

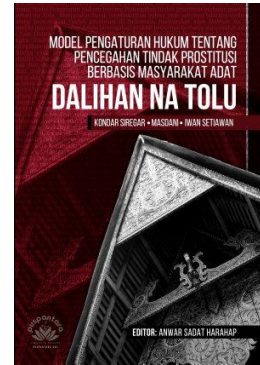
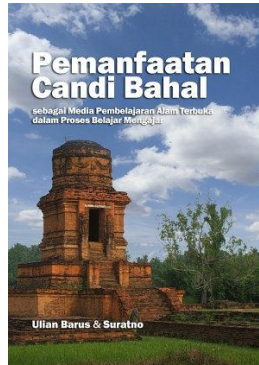
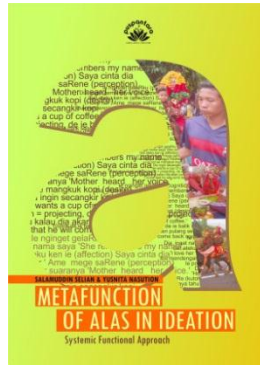




ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

The Alliance of Independent Journalist

www.medan.aji.or.id



Narahubung Puspantara.org

- **CEO, Fauzan Nur Ahmadi 082274637785**



Lampiran II Contoh Naskah

Sesat Pikir Pemblokiran Website

Vinsensius Sitepu

Saya mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi mencanangkan gerakan anti *hoax*. Tetapi itu tidak cukup dan lebih mudah dijadikan bumerang bagi pemerintah sendiri, terlebih-lebih ketika kita meneropong lebih dalam kebijakan pemerintah akhir-akhir ini. Jujur saja, saya tak habis pikir terhadap kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menutup akses sebelas website yang berhaluan Islam itu. Alih-alih ingin melakukan deradikalisasi pemikiran, kesan yang muncul justru adalah pemerintah sangat tendensius terhadap Islam itu sendiri.

Padahal jikalau lebih jauh dan komprehensif, masih banyak sekali website-website yang tidak bernada Islam bertindak laku serupa dan tak kalah "ganasnya". Bagi saya, jelas tindakan itu berdasarkan alam pikir terbang pilih.

Ini jelas timpang, walaupun Menteri Rudiantara kepada media mengatakan bahwa pemblokiran adalah pilihan terakhir. Nah, bagaimana itu bisa dikatakan pilihan terakhir, ketika pilihan awal dari segi pendidikan literasi tidak diselenggarakan secara sistematis dan menyeluruh? Rudiantara sendiri menegaskan bahwa: diri sendiri adalah pihak pertama yang bisa menepis rantai penyebaran *hoax* itu.

Pemerintah seolah-olah melupakan prinsip intelektual, bahwa tulisan dilawan dengan tulisan dan pikiran dilawan dengan pemikiran, bukan pola pikir sesat membungkam dan memberangus begitu saja.

Apa faedahnya memblokir? Toh dengan mudah konten website yang serupa dapat dengan cepat muncul di website dengan nama berbeda atau pindahkan seluruhnya ke Facebook, karena media sosial itu praktis tidak diblok sama sekali.



Agak kontras dengan itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Yhannu Setiawan menyatakan melalui media, bahwa perlawanan terhadap *hoax* atau berita bohong di berbagai media sosial harus dengan cara menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Katanya, "Munculnya fenomena *hoax* di masyarakat adalah akibat dari masih buruknya lembaga-lembaga negara dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik.". Yhannu berujar, tidak jarang informasi yang disediakan dan disampaikan itu justru tidak akurat, tidak benar, bahkan cenderung menyesatkan. Sehingga, kata dia, pemerintah seolah-olah menjadi sumber *hoax* itu sendiri. Informasi tersebut akan digunakan oleh pimpinan negara untuk mengambil kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan "aksi *blocking*" itu, di media massa Kemkominfo mengungkapkan mampu melihat percakapan di aplikasi *instant messenger* seperti BBM, WA, dan LINE untuk melihat konten-konten yang dianggap "berbahaya" bagi negara. Ini barangkali akan diterapkan pemerintah melalui Badan Siber Nasional (Basinas) yang pembentukannya saat ini sedang digodok. Soal pendirian ini, argumen pemerintah adalah untuk menangkal kemungkinan ancaman siber dari luar, sesuatu yang barangkali masih dapat diperdebatkan.

Pemerintah sebenarnya sadar bahwa aplikasi seperti itu masuk di wilayah privat pengguna. Namun atas nama keamanan negara yang didefinisikan secara sepihah, cara-cara seperti ini mengingatkan kita pada langkah National Security Agency (NSA) di Amerika Serikat yang melakukan penyadapan menyeluruh terhadap komunikasi pribadi warga di sana, yang dimulai sejak 2001 silam. Kebijakan di era George W. Bush itu diteruskan hingga era Obama dan diungkapkan kepada dunia oleh Edward Snowden. Bayangkan, pemerintah Amerika Serikat dengan sangat mudah mengendus setiap percakapan dan komunikasi sekecil-kecilnya warga AS. Dengan kata lain pemerintah memiliki akses sedalam-dalamnya, termasuk akses kepada kamera laptop serta percakapan-percakapan pribadi lainnya. Pembeneran atas semua itu adalah demi keamanan nasional pasca penyerangan gedung kembar WTC yang hingga saat ini masih dirundung kontroversi.

Edward Snowden sendiri hingga kini dikabarkan masih di Rusi dan mendapatkan suaka dari pemerintah di sana, sebab pemerintah Amerika



Serikat menegaskan tidak akan mengampuninya dan melabelinya sebagai musuh negara (*enemy of the state*).

Kebijakan pemerintah Indonesia melindungi negara dengan cara memblokir dan mengendus informasi komunikasi, lebih mirip cara-cara negara otoriter dalam menjalankan pemerintahan, bukan demokrasi yang sehat sesuai konstitusi yang kita agung-agungkan selama ini. Bagi saya memblokir website itu sangat keblinger, jauh dari faedah yang bisa didapatkan jikalau dibandingkan dengan langkah pendidikan literasi media, dalam wujud konkretnya di kurikulum pendidikan sejak dini.

Menurut hemat saya, menebarkan kebencian dan informasi bohong alias *hoax* itu dimulai dari pikiran. Dan pikiran berpangkal dari bagaimana otak bekerja mengolah datanya. Karena pendidikan literasi media adalah mengendalikan otak, maka solusinya adalah menempatkan pendidikan cerdas bermedia sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kita. Yang saya sebutkan metode pendidikan di sini, bukanlah pendidikan dalam kelas, tetapi pendidikan luar ruang, melalui permainan kreatif, membaca buku, berdiskusi, dan berdialog dengan pihak-pihak lain tentang keragaman, bukan mencari perbedaan dalam persamaan. Pangkal pikir pendidikan ini adalah memahami bahwa merayakan perbedaan adalah keniscayaan, bukan mencari-cari perbedaan, tetapi persamaan yang menyejukkan mental.

Lalu, kita pun tahu bahwa Undang-undang ITE sendiri masih sarat dengan pasal karet, yang sangat mudah digunakan banyak pihak, termasuk penguasa untuk membungkam kemerdekaan bersuara dan berekspresi, dengan mengatasnamakan demokrasi. pada tahap berpikir saja kita ingin menghadang orang berpendapat, sejatinya di situlah kita memenjarakan orang untuk merdeka terhadap dirinya sendiri. Indonesia seperti, kalau dengan seenak udelnnya menutup website-website seperti itu.

Cakap Bermedia

Menurut Baran (2002) kecakapan bermedia adalah kemampuan untuk secara efektif dan secara efisien memahami dan menggunakan komunikasi massa. Sedangkan Messaris dalam Baran menyebutkan, kecakapan bermedia adalah pengetahuan tentang bagaimana media berfungsi terhadap masyarakat. Lalu oleh Rubin masih dalam Baran, mendefinisikan kecakapan bermedia sebagai pemahaman terhadap sumber-sumber dan teknologi komunikasi, kode-kode



yang digunakan, pesan-pesan diproduksi, proses seleksi, interpretasi dan efek dari pesan-pesan tersebut.

Lebih jauh daripada itu, kecakapan bermedia ditujukan untuk memampukan orang banyak agar mahir dalam membuat dan memproduksi pesan media, keduanya dalam memfasilitasi dan memahami kekuatan dan keterbatasan setiap medium, termasuk juga bagaimana membuat media independen.

Dengan mengubah proses konsumsi media ke dalam proses aktif dan kritis, orang-orang akan memperoleh kesadaran yang baik atas potensi salah tafsir dan manipulasi, khususnya melalui iklan dan teknik kehumasan, dan memahami perilaku media dan partisipasi media dalam mengkonstruksi cara pandang terhadap realitas.

Tetapi kecakapan bermedia bukan hanya seputar persoalan mengonsumsi informasi. Kecakapan bermedia yang ideal dimaksudkan mengupayakan setiap individu mampu memproduksi, mengkreasi dan secara efektif berkomunikasi dalam berbagai wujud, tidak hanya cetak. Misalnya penggunaan teknologi internet untuk menghadirkan informasi yang memiliki konten yang lebih kaya dan menggapai sasaran yang lebih luas. Individu media setidaknya paham bahwa dengan internet mampu merepresentasikan kombinasi atas banyak wujud pesan, mulai dari pesan tertulis, video, suara, gambar dan animasi.

Di Inggris dan Australia kecakapan bermedia seringkali menjadi mata pelajaran tersendiri, sama halnya pada kurikulum Bahasa Inggris. Pada tingkatan senior, usia 11 tahun dan 12 tahun, beberapa negara bagian menawarkan studi media sebagai pilihan kajian. Misalnya banyak sekolah di Queensland menawarkan kajian perfilman, televisi, dan media baru.

Sedangkan sekolah-sekolah di Victoria pendidikan media didukung penuh oleh asosiasi guru-guru profesional yang mengajar subjek pelajaran media. Mereka tergabung dalam Australian Teachers of Media (ATOM) yang juga menerbitkan sumber-sumber penting berupa publikasi dan panduan yang baik.

Sementara itu di Eropa, pendidikan media hadir dalam berbagai bentuk berbeda. Pendidikan media diperkenalkan pada kurikulum dasar Finlandia pada tahun 1970 dan pada pendidikan menengah atas di tahun 1977. Tetapi

pendidikan media yang kenal saat ini tidak berkembang di Finlandia hingga tahun 1990-an. Sedangkan di Swedia pendidikan media semakin berkembang sejak tahun 1980. Dan di Denmark sejak tahun berkembang sejak tahun 1970 yang fokus pada teknologi informasi. Di Prancis dan Jerman, masing-masing menitikberatkan pada film dan Jerman giat menerbitkan teori-teori mengenai kecakapan bermedia.

Saya menegaskan bahwa upaya pemblokiran dan kemudian nanti pengendalian komunikasi privat jelas menunjukkan kelemahan pemerintah sendiri dalam menangani demokrasi keberagaman. Dengan kata lain, kita sudah menanggalkan jauh-jauh cara-cara "demokrasi terpimpin" cara Soekarno dan pseudo-demokrasi di era Soeharto yang mengontrol secara ketat cara warga berkomunikasi melalui media yang ada.

Lampiran III Contoh Profil Singkat Penulis



Vinsensius Sitepu adalah pendiri komunitas kreatif MahapalaMultimedia (mahapalamultimedia.com) di Medan. Sejak 2001 aktif menulis di Tabloid Komputer *PCPlus* dan Majalah *Info Komputer*. Saat ini berkontribusi untuk infokomputer.com. Ketiga media ini berada di bawah naungan Kelompok Kompas Gramedia (KKG), Jakarta. Vinsensius Sitepu juga menulis di surat kabar lokal di Medan, *Analisa* (analisadaily.com) dan *Harian Bisnis dan Ekonomi, Kontan* (KKG), serta media daring lokal *KabarMedan.com*.